



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 234);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Penetapan Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp30.322.891.888,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus

sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp27.456.187.755,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah); dan
- b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp2.866.704.133,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

BAB III

ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa di daerah; dan
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Bagian Kedua Pembagian secara Proporsional

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Bagian Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Lain-lain Pajak Daerah.
- b. Bagian Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan retribusi daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
 - 1) retribusi pasar;
 - 2) retribusi pariwisata;
 - 3) retribusi terminal; dan
 - 4) lain-lain retribusi daerah.

Bagian Ketiga Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional

Pasal 5

Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$PP = [(Bp1 \times Rp1) + (Bp2 \times Rp2) + (Bp3 \times Rp3)] \times (PD - PM)$$

Keterangan :

- PP : Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
 Bp1 : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
 Rp1 : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
 Bp2 : Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
 Rp2 : Rasio Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
 Bp3 : Bobot Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 Rp3 : Rasio Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 PD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
 PM : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Bobot Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Bpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Bpx : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
 Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap desa.
 Total Pendapatan Pajak Daerah : Total realisasi pendapatan pajak daerah tahun lalu.

Pasal 7

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Realisasi Px}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Rpx : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah tahun lalu setiap desa.
- Total Realisasi Px : Total realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa tahun lalu.

Bagian Keempat

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional

Pasal 8

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$RP = [(Br1 \times Rr1) + (Br2 \times Rr2) + (Br3 \times Rr3) + (Br4 \times Rr4)] \times (RD - RM)$$

Keterangan :

- RP : Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
- Br1 : Bobot Retribusi Pasar setiap desa.
- Rr1 : Rasio Retribusi Pasar setiap desa.
- Br2 : Bobot Retribusi Pariwisata setiap desa.
- Rr2 : Rasio Retribusi Pariwisata setiap desa.
- Br3 : Bobot Retribusi Terminal setiap desa.
- Rr3 : Rasio Retribusi Terminal setiap desa.
- Br4 : Bobot Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
- Rr4 : Rasio Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
- RD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.
- RM : Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Bobot Retribusi Pasar setiap desa, Retribusi Pariwisata setiap desa, Retribusi Terminal setiap desa, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Brx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Brx : Bobot Retribusi Pasar setiap desa, Retribusi Pariwisata setiap desa, Retribusi Terminal setiap desa, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.
- Realisasi Rx : Realisasi Retribusi Pasar setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah tahun lalu setiap desa.
- Total Pendapatan Retribusi Daerah : Total realisasi pendapatan retribusi daerah tahun lalu.

Pasal 10

Rasio Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rrx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Realisasi Rx}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Rrx : Rasio Retribusi Pasar setiap desa, Retribusi Pariwisata setiap desa, Retribusi Terminal setiap desa, dan Lain-lain Retribusi setiap desa.
- Realisasi Rx : Realisasi Retribusi Pasar setiap desa, Retribusi Pariwisata setiap desa, Retribusi Terminal setiap desa, dan Lain-lain Retribusi setiap desa tahun lalu.
- Total Realisasi Rx : Total realisasi Retribusi Pasar setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal setiap desa (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa tahun lalu.

BAB IV

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Pasal 11

Rincian besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih lebih bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan dikurangkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025.
- (2) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih kurang bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan ditambahkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2025.
- (3) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara merata kepada seluruh desa mengacu pada realisasi tahun yang bersangkutan.
- (4) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa menggunakan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rumus perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa mengacu realisasi pada tahun bersangkutan; dan
 - b. untuk rumus perhitungan bobot dan rumus perhitungan rasio dalam perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa, mengacu realisasi pada tahun bersangkutan.
- (5) Selisih lebih bayar/kurang bayar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Daerah belum melaksanakan perhitungan terhadap Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), maka perhitungan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023


NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH	
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH		
1	2	3	4	5	6	
1	PLANTUNGAN	1	Blumah	85.879.405	9.819.381	95.698.786
		2	Kediten	85.786.274	9.819.381	95.605.655
		3	Tlogopayung	88.015.147	9.819.381	97.834.528
		4	Wonodadi	87.221.274	9.819.381	97.040.655
		5	Manggungmangu	87.603.033	9.819.381	97.422.414
		6	Tirtomulyo	89.565.067	9.819.381	99.384.448
		7	Jurangagung	87.499.144	9.819.381	97.318.525
		8	Karanganyar	85.779.748	9.819.381	95.599.129
		9	Jati	86.072.897	9.819.381	95.892.278
		10	Bendosari	87.260.252	9.819.381	97.079.633
		11	Wadas	87.331.052	9.819.381	97.150.433
		12	Mojoagung	87.812.060	9.819.381	97.631.441
2	SUKOREJO	1	Gentinggunung	87.902.879	9.819.381	97.722.260
		2	Bringinsari	86.917.297	9.819.381	96.736.678
		3	Purwosari	86.080.143	9.819.381	95.899.524
		4	Ngargosari	86.146.439	9.819.381	95.965.820
		5	Pesaren	88.134.053	9.819.381	97.953.434
		6	Tamanrejo	88.997.254	9.819.381	98.816.635
		7	Harjodowo	87.313.403	9.819.381	97.132.784
		8	Peron	87.102.710	9.819.381	96.922.091
		9	Damarjati	86.579.489	9.819.381	96.398.870
		10	Mulyosari	88.060.751	9.819.381	97.880.132
		11	Kalipakis	87.342.031	9.819.381	97.161.412
		12	Trimulyo	87.402.916	9.819.381	97.222.297
		13	Selokaton	87.360.907	9.819.381	97.180.288
		14	Ngadiwarno	93.536.483	9.819.381	103.355.864
		15	Tamping Winarno	87.792.782	9.819.381	97.612.163
		16	Kebumen	94.117.573	14.907.521	109.025.094
		17	Sukorejo	126.092.642	36.197.559	162.290.201
		18	Kalibogor	87.788.702	9.819.381	97.608.083
3	PAGERUYUNG	1	Getasblawong	86.241.822	9.819.381	96.061.203
		2	Gondoharum	87.096.560	9.819.381	96.915.941
		3	Parakansebaran	87.289.536	9.819.381	97.108.917
		4	Petung	85.784.728	9.819.381	95.604.109
		5	Krikil	86.857.280	9.819.381	96.676.661
		6	Pucakwangi	87.129.377	9.819.381	96.948.758
		7	Pageruyung	88.108.771	9.819.381	97.928.152
		8	Tambahrejo	88.351.119	9.819.381	98.170.500
		9	Gebangan	87.003.131	9.819.381	96.822.512
		10	Surokontowetan	88.279.664	9.819.381	98.099.045
		11	Bangunsari	87.989.195	9.819.381	97.808.576

		12	Kebongembong	87.249.650	9.819.381	97.069.031
		13	Surokontokulon	87.387.160	9.819.381	97.206.541
		14	Pagergunung	87.373.098	9.819.381	97.192.479
4	PATEAN	1	Pakistan	86.732.748	9.819.381	96.552.129
		2	Mlatiharjo	89.185.026	9.819.381	99.004.407
		3	Plososari	91.371.378	9.819.381	101.190.759
		4	Wirosari	87.105.066	9.819.381	96.924.447
		5	Pagersari	90.572.495	9.819.381	100.391.876
		6	Selo	88.449.432	9.819.381	98.268.813
		7	Curugsewu	100.601.512	34.499.581	135.101.093
		8	Gedong	96.671.132	9.819.381	106.490.513
		9	Sukomangli	85.571.932	9.819.381	95.391.313
		10	Kalibareng	90.693.422	9.819.381	100.512.803
		11	Kalilumpang	87.298.884	9.819.381	97.118.265
		12	Kalices	86.498.101	9.819.381	96.317.482
		13	Sidokumpul	87.942.621	9.819.381	97.762.002
		14	Sidodadi	88.546.494	9.819.381	98.365.875
5	SINGOROJO	1	Cening	89.330.600	9.819.381	99.149.981
		2	Sukodadi	86.520.993	9.819.381	96.340.374
		3	Kaliputih	90.842.126	9.819.381	100.661.507
		4	Getas	90.765.470	9.819.381	100.584.851
		5	Banyuringin	88.534.944	9.819.381	98.354.325
		6	Kedungsari	93.246.170	9.819.381	103.065.551
		7	Ngareanak	87.028.276	9.819.381	96.847.657
		8	Singorojo	86.744.776	9.819.381	96.564.157
		9	Cacaban	85.477.556	9.819.381	95.296.937
		10	Kalirejo	88.426.682	9.819.381	98.246.063
		11	Merbuh	91.266.417	9.819.381	101.085.798
		12	Trayu	85.932.990	9.954.059	95.887.049
		13	Kertosari	119.046.259	9.819.381	128.865.640
6	LIMBANGAN	1	Kedungboto	90.162.435	9.819.381	99.981.816
		2	Peron	92.495.428	9.819.381	102.314.809
		3	Gondang	87.088.456	9.819.381	96.907.837
		4	Pakis	87.949.979	9.819.381	97.769.360
		5	Sumberahayu	85.928.803	9.819.381	95.748.184
		6	Tambahsari	86.645.451	9.819.381	96.464.832
		7	Limbangan	92.187.346	14.185.913	106.373.259
		8	Pagertojo	85.732.559	9.819.381	95.551.940
		9	Sriwulan	85.793.083	9.819.381	95.612.464
		10	Tabet	88.438.689	9.819.381	98.258.070
		11	Ngesrep Balong	88.502.933	9.819.381	98.322.314
		12	Gonoharjo	93.064.395	9.819.381	102.883.776
		13	Jawisari	86.336.012	9.819.381	96.155.393
		14	Margosari	91.610.986	9.819.381	101.430.367
		15	Tamanrejo	110.202.897	9.819.381	120.022.278
		16	Pagerwojo	87.504.942	9.819.381	97.324.323
7	BOJA	1	Medono	85.956.154	9.819.381	95.775.535
		2	Pasigitan	90.879.813	9.819.381	100.699.194
		3	Banjarejo	92.747.066	9.819.381	102.566.447
		4	Leban	88.966.421	9.819.381	98.785.802
		5	Kliris	128.694.756	9.819.381	138.514.137
		6	Puguh	86.984.133	9.819.381	96.803.514
		7	Ngabean	136.450.987	9.819.381	146.270.368
		8	Karangmanggis	88.568.207	9.819.381	98.387.588
		9	Kaligading	104.120.689	9.819.381	113.940.070
		10	Purwogondo	90.281.179	9.819.381	100.100.560
		11	Blimbing	90.816.508	9.819.381	100.635.889
		12	Salamsari	101.386.548	9.819.381	111.205.929
		13	Tampingan	111.316.826	9.819.381	121.136.207

		14	Campurejo	191.130.776	9.819.381	200.950.157
		15	Boja	122.905.900	51.084.039	173.989.939
		16	Bebengan	99.245.017	9.819.381	109.064.398
		17	Meteseh	426.963.351	9.819.381	436.782.732
		18	Trisobo	204.107.633	9.819.381	213.927.014
8	KALIWUNGU	1	Kumpulrejo	144.595.497	9.819.381	154.414.878
		2	Karangtengah	128.819.277	9.819.381	138.638.658
		3	Sarirejo	181.083.689	34.791.077	215.874.766
		4	Krajankulon	117.051.695	9.819.381	126.871.076
		5	Kutoharjo	100.422.373	9.819.381	110.241.754
		6	Nolokerto	280.702.071	9.819.381	290.521.452
		7	Sumberejo	179.055.993	9.819.381	188.875.374
		8	Mororejo	179.024.092	9.819.381	188.843.473
		9	Wonorejo	1.820.991.730	9.819.381	1.830.811.111
9	KALIWUNGU SELATAN	1	Jerukgiling	85.130.581	9.819.381	94.949.962
		2	Kedungsuren	87.773.993	9.819.381	97.593.374
		3	Darupono	162.788.244	9.819.381	172.607.625
		4	Protomulyo	105.551.874	9.819.381	115.371.255
		5	Magelung	205.288.448	9.819.381	215.107.829
		6	Plantaran	109.359.130	22.616.729	131.975.859
		7	Sukomulyo	97.427.156	9.819.381	107.246.537
		8	Sidomakmur	86.390.639	9.819.381	96.210.020
10	BRANGSONG	1	Tunggulsari	88.939.568	9.819.381	98.758.949
		2	Sumur	87.540.549	9.819.381	97.359.930
		3	Penjalin	91.436.121	9.819.381	101.255.502
		4	Kertomulyo	89.004.019	9.819.381	98.823.400
		5	Blorok	98.474.406	9.819.381	108.293.787
		6	Sidorejo	104.746.983	24.997.949	129.744.932
		7	Tosari	109.685.080	9.819.381	119.504.461
		8	Rejosari	105.974.706	9.819.381	115.794.087
		9	Turunrejo	92.114.989	9.819.381	101.934.370
		10	Purwokerto	95.308.749	9.819.381	105.128.130
		11	Brangsong	211.480.120	9.819.381	221.299.501
		12	Kebonadem	92.970.961	9.819.381	102.790.342
11	PEGANDON	1	Pekuncen	86.832.077	9.819.381	96.651.458
		2	Puguh	88.134.153	9.819.381	97.953.534
		3	Wonosari	86.404.568	9.819.381	96.223.949
		4	Dawungsari	86.531.966	9.819.381	96.351.347
		5	Margomulyo	87.992.020	9.819.381	97.811.401
		6	Tegorejo	92.245.444	9.819.381	102.064.825
		7	Pesawahan	86.762.112	9.819.381	96.581.493
		8	Karangmulyo	87.204.699	9.819.381	97.024.080
		9	Pucangrejo	86.822.527	9.819.381	96.641.908
		10	Gubugsari	88.642.584	9.819.381	98.461.965
		11	Pegandon	90.352.187	9.819.381	100.171.568
		12	Penanggulan	91.034.276	26.961.197	117.995.473
12	NGAMPEL	1	Winong	89.948.096	9.819.381	99.767.477
		2	Jatirejo	87.610.428	9.819.381	97.429.809
		3	Rejosari	86.528.186	9.819.381	96.347.567
		4	Sumbersari	87.963.747	9.819.381	97.783.128
		5	Kebonagung	87.563.360	9.819.381	97.382.741
		6	Ngampelkulon	87.196.741	9.819.381	97.016.122
		7	Ngampelwetan	86.154.297	9.819.381	95.973.678
		8	Sudipayung	89.291.257	9.819.381	99.110.638
		9	Dempelrejo	89.474.296	9.819.381	99.293.677
		10	Putatgede	89.328.262	9.819.381	99.147.643
		11	Bojonggede	86.055.397	9.819.381	95.874.778
		12	Banyuurip	89.165.973	9.819.381	98.985.354
13	GEMUH	1	Sojomerto	89.741.706	9.819.381	99.561.087

		2	Triharjo	90.377.250	9.819.381	100.196.631
		3	Galih	87.133.349	9.819.381	96.952.730
		4	Cepokomulyo	88.548.725	9.819.381	98.368.106
		5	Sedayu	86.037.169	9.819.381	95.856.550
		6	Pamriyan	87.002.202	9.819.381	96.821.583
		7	Jenarsari	101.923.296	11.506.621	113.429.917
		8	Poncorejo	92.271.350	9.819.381	102.090.731
		9	Gebang	87.852.765	9.819.381	97.672.146
		10	Krompaan	86.398.623	9.819.381	96.218.004
		11	Gemuhblanten	103.210.140	9.819.381	113.029.521
		12	Tamangede	88.917.183	9.819.381	98.736.564
		13	Lumansari	88.844.531	9.819.381	98.663.912
		14	Johorejo	86.845.600	9.819.381	96.664.981
		15	Tlahab	87.520.726	9.819.381	97.340.107
		16	Pucangrejo	155.122.046	9.819.381	164.941.427
14	RINGINARUM	1	Ngerjo	86.811.362	9.819.381	96.630.743
		2	Kedungasri	87.670.679	9.819.381	97.490.060
		3	Kedunggading	89.508.894	9.819.381	99.328.275
		4	Ringinarum	95.307.713	9.819.381	105.127.094
		5	Tejorejo	93.205.261	9.819.381	103.024.642
		6	Ngawensari	87.975.474	9.819.381	97.794.855
		7	Wungurejo	88.440.551	9.819.381	98.259.932
		8	Rowobranten	87.130.445	9.819.381	96.949.826
		9	Mojo	86.913.192	9.819.381	96.732.573
		10	Purworejo	93.132.434	9.819.381	102.951.815
		11	Pagerdawung	88.108.672	9.819.381	97.928.053
		12	Caruban	100.699.994	9.819.381	110.519.375
15	WELERI	1	Sidomukti	96.123.900	9.819.381	105.943.281
		2	Penyangkringan	114.816.934	21.978.547	136.795.481
		3	Bumiayu	98.885.779	9.819.381	108.705.160
		4	Manggungsari	90.299.347	9.819.381	100.118.728
		5	Sumberagung	89.848.698	9.819.381	99.668.079
		6	Ngasinan	91.639.427	9.819.381	101.458.808
		7	Weleri	98.149.869	9.819.381	107.969.250
		8	Nawang Sari	92.173.107	9.819.381	101.992.488
		9	Karangdowo	90.709.101	33.529.337	124.238.438
		10	Penaruban	103.190.721	9.819.381	113.010.102
		11	Sambongsari	93.589.316	9.819.381	103.408.697
		12	Karanganom	95.381.052	9.819.381	105.200.433
		13	Payung	88.457.304	9.819.381	98.276.685
		14	Pucuksari	90.420.091	9.819.381	100.239.472
		15	Tratemulyo	91.795.723	9.819.381	101.615.104
		16	Montongsari	101.669.904	9.819.381	111.489.285
16	ROWOSARI	1	Wonotenggung	89.290.447	9.819.381	99.109.828
		2	Pojoksari	86.971.350	9.819.381	96.790.731
		3	Randusari	88.036.647	9.819.381	97.856.028
		4	Karangsari	88.442.045	9.819.381	98.261.426
		5	Parakan	86.620.155	9.819.381	96.439.536
		6	Tambaksari	88.642.560	9.819.381	98.461.941
		7	Jatipurwo	88.526.116	9.819.381	98.345.497
		8	Rowosari	93.318.575	9.819.381	103.137.956
		9	Tanjungsari	87.639.102	9.819.381	97.458.483
		10	Tanjunganom	85.812.096	9.819.381	95.631.477
		11	Sendangdawuhan	89.017.463	9.819.381	98.836.844
		12	Kebonsari	88.265.267	9.819.381	98.084.648
		13	Bulak	89.417.963	9.819.381	99.237.344
		14	Gebanganom	86.652.338	9.819.381	96.471.719
		15	Gempolsewu	92.385.872	9.819.381	102.205.253
		16	Sendangsikucing	94.288.510	20.723.272	115.011.782

17	CEPIRING	1	Pandes	87.878.828	9.819.381	97.698.209
		2	Podosari	91.039.069	9.819.381	100.858.450
		3	Botomulyo	113.584.388	9.819.381	123.403.769
		4	Gondang	96.700.334	9.819.381	106.519.715
		5	Karangsono	87.941.345	9.819.381	97.760.726
		6	Cepiring	106.923.086	33.222.989	140.146.075
		7	Karangayu	93.943.945	9.819.381	103.763.326
		8	Sidomulyo	88.106.657	9.819.381	97.926.038
		9	Damarsari	87.335.601	9.819.381	97.154.982
		10	Juwiring	88.753.674	9.819.381	98.573.055
		11	Kaliayu	88.250.493	9.819.381	98.069.874
		12	Kalirandugede	87.321.688	9.819.381	97.141.069
		13	Korowelangkulon	87.161.693	9.819.381	96.981.074
		14	Korowelanganyar	86.536.475	9.819.381	96.355.856
		15	Margorejo	86.231.609	9.819.381	96.050.990
18	KANGKUNG	1	Sendangkulon	92.085.503	9.819.381	101.904.884
		2	Sendangdawung	88.978.210	9.819.381	98.797.591
		3	Sukodadi	86.251.506	9.819.381	96.070.887
		4	Kaliyoso	86.529.366	9.819.381	96.348.747
		5	Gebanganomwetan	86.878.636	9.819.381	96.698.017
		6	Kadilangu	86.928.866	9.819.381	96.748.247
		7	Truko	89.708.444	9.819.381	99.527.825
		8	Lebosari	89.264.050	9.819.381	99.083.431
		9	Kangkung	88.035.672	20.702.493	108.738.165
		10	Laban	85.713.705	9.819.381	95.533.086
		11	Karangmalangwetan	87.686.522	9.819.381	97.505.903
		12	Jungsemi	90.909.537	9.819.381	100.728.918
		13	Tanjungmojo	94.505.907	9.819.381	104.325.288
		14	Rejosari	90.464.420	9.819.381	100.283.801
		15	Kalirejo	91.560.898	9.819.381	101.380.279
19	PATEBON	1	Lanji	88.848.049	9.819.381	98.667.430
		2	Donosari	89.814.111	9.819.381	99.633.492
		3	Margosari	86.942.064	9.819.381	96.761.445
		4	Bulugede	89.448.050	9.819.381	99.267.431
		5	Tambakrejo	89.774.928	9.819.381	99.594.309
		6	Kebonharjo	106.190.590	9.819.381	116.009.971
		7	Purwosari	87.996.843	9.819.381	97.816.224
		8	Jambearum	100.018.455	9.819.381	109.837.836
		9	Purwokerto	95.414.068	9.819.381	105.233.449
		10	Sukolilan	86.970.499	9.819.381	96.789.880
		11	Bangunrejo	85.985.062	9.819.381	95.804.443
		12	Kumpulrejo	86.550.528	9.819.381	96.369.909
		13	Magersari	84.850.025	9.819.381	94.669.406
		14	Wonosari	93.272.016	9.819.381	103.091.397
		15	Kartikajaya	88.284.911	9.819.381	98.104.292
		16	Bangunsari	85.687.201	9.819.381	95.506.582
		17	Pidodowetan	95.228.697	9.819.381	105.048.078
		18	Pidodokulon	89.997.276	9.819.381	99.816.657
			Jumlah	27.456.187.755	2.866.704.133	30.322.891.888

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL,

 NUR FUAD, S.H., M.H.
 Pembina Tk I
 NIP. 19700215 199003 1 006

BUPATI KENDAL,
 Cap ttd
 DICO M GANINDUTO